

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Bantul

1. Slogan Kabupaten Bantul

Slogan Kabupaten Bantul adalah PROJOTAMANSARI yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Produktif-profesional

Artinya bahwa semua potensi yang ada di Kabupaten Bantul baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya bisa berproduksi sehingga mampu membantu mengembangkan potensi daerah, sedangkan profesionalnya lebih ditekankan kepada setiap warganya untuk benar-benar ahli dan matang dalam setiap bidang yang mereka kerjakan, tolak ukur dari profesionalisme ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemerintah, pembangunan daerah, baik sarana maupun prasarannya.

b. Ijo royo-royo

Artinya tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang, perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam

rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

c. Tertib

Artinya bahwa setiap warga secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

d. Aman

Artinya bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

e. Sehat

Artinya bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat atau manusia yang menghuninya.

f. Asri

Artinya bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak harus mewah tetapi lebih

cenderung pemanfaatan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

2. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

a. Visi

Visi Kabupaten Bantul adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu: "Bantul PROJOTAMANSARI sejahtera, demokratis, dan agamis."

b. Misi

Adapun misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tatakelola pemerintahan yang empatik.
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan yang berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.
4. Peningkatan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan ruang dan pelestarian lingkungan.

3. Kondisi geografis

a. Letak Wilayah

Wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 110° 12'34" sampai 110° 31'08" Bujur Timur dan antara 7° 04'04" sampai 8° 00'27" Lintang Selatan. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari lima Kabupaten atau Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Pulau Jawa. Bagian utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, kemudian bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, dibagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia (Bantul Dalam Angka 2015).

b. Kondisi Administratif

Kabupaten Bantul secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Padukuhan. Desa yang berada di Kabupaten Bantul dibagi berdasarkan status desa pedesaan dan perkotaan. Kecamatan Dlingo merupakan kecamatan paling luas yaitu 55,87 km² dan Kecamatan Srandakan adalah Kecamatan paling sempit yaitu 18,32 km², sedangkan jumlah pedesaan dan padukuhan terbanyak berada di Kecamatan Imogiri yaitu 8 desa dan 72 padukuhan, serta yang mempunyai jumlah pedesaan dan padukuhan terkecil adalah Kecamatan Srandakan yaitu 2 desa dan 43 padukuhan.

Tabel 2.1

Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
	Jumlah	75	933	504,47

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

c. Penduduk

Berdasarkan data proyeksi pada tahun 2010-2020, jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2016 mencapai 971.511 jiwa

yang tersebar di 75 desa dan 17 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bantul. Dari data tersebut terdapat 481.510 laki-laki dan 490.001 perempuan, dengan luas wilayah 506,85 km² adalah 1.972 jiwa per km² dan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banguntapan yaitu dengan jumlah 4.771 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Dlingo memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 653 jiwa per km² (BPS Kab.Bantul).

Tabel 2.2**Kepadatan Penduduk Geografis Di Kabupaten Bantul Tahun 2016**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1.	Srandakan	18,32	29.130	1.590
2.	Sanden	23,16	30.114	1.300
3.	Kretek	26,77	30.111	1.125
4.	Pundong	23,68	32.321	1.365
5.	Bambanglipuro	22,69	38.206	1.684
6.	Pandak	24,30	48.950	2.014
7.	Bantul	21,96	62.128	2.828
8.	Jetis	24,47	54.233	2.216
9.	Imogiri	54,49	58.082	1.006
10.	Dlingo	55,87	36.465	653
11.	Pleret	22,97	46.058	2.005
12.	Piyungan	32,54	53.422	1.645
13.	Banguntapan	28,48	135.888	4.771
14.	Sewon	27,16	112.323	4.142
15.	Kasih	32,38	122.323	3.778
16.	Pajangan	33,25	35.053	1.054
17.	Sedayu	34,36	46.523	1.354
	Jumlah	506,85	971.511	1.917

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

4. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, tercatat jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2016 sebesar 660 orang. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2016 tercatat sebanyak

2.107 jiwa, yang terdiri dari 423 orang laki-laki dan 1.684 orang perempuan.

Tabel 2.3
Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2015

No	Jenis Kegiatan Utama	Tahun			
		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
I.	Angkatan kerja	70,76	66,78	67,55	67,84
1	Bekerja	96,40	96,46	97,43	97,00
2	Pengangguran	3,60	3,36	2,57	3,00
II	Bukan angkatan kerja	29,24	33,22	32,45	32,16
1	Sekolah	28,14	13,75	27,83	28,97
2	Mengurus rumah tangga	57,34	59,10	57,81	57,16
3	Lainnya	14,52	27,15	14,36	13,88
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat partisipasi angkatan kerja		70,76	66,78	67,55	67,84
Tingkat pengangguran		3,60	3,36	2,57	3,00

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

Tingginya angka tidak hanya akan menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2015 di Kabupaten Bantul, presentase penduduk angkatan kerja sebesar 67,84 persen, naik 0,29 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara presentase jumlah penduduk yang bekerja sebesar 97,00 terhadap jumlah angkatan kerja, berkurang sebesar 0,43 poin

jika dibandingkan tahun 2014. Presentase pengangguran di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 mencapai 3,00 bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.2 Profil TKPK Kabupaten Bantul

a. Wewenang TKPK Kabupaten Bantul sebagai berikut berdasarkan Perbup Nomor 68 tahun 2011 :

1. Melakukan koordinasi antar SKPD dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah.
2. Menyusun langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.
4. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat di Daerah.

b. Tugas TKPK Kabupaten Bantul berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Permendagri 42 tahun 2010 sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

c. TKPK Kabupaten Bantul mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi koordinasi berdasarkan Pasal 10 Permendagri 42 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian SKPD Kabupaten Bantul dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul di bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD.
3. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD.

2. Fungsi pengendalian sebagai berikut :

1. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

2. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.
4. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
5. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.
6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati atau Walikota dan TKPK Provinsi.

d. Struktur Organisasi TKPK Kabupaten Bantul

Penanggung Jawab	: Bupati Bantul	Drs. H. Suharsono
Ketua	: Wakil Bupati	H. Abdul Halim Muslih
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah	Drs. Riyantono, M.Si
Sekretaris	: Kepala Bappeda	Ir. Fenty Yusdayati, MT

Wakil : 1. Kepala BKK Kabupaten Bantul Drs. Mahmudi, M.Si

Sekretaris

Sekretariat

Ketua : Sekretaris Bappeda Ari Purwaningsih, SE. M.Si

Kabupaten Bantul

Anggota 1. Kabid Pemerintahan Dan Dedy Nugraha, S.IP

Pemberdayaan Masyarakat Bappeda

Kabupaten Bantul

2. Kasubbid Pemerintahan Bappeda Eni Kriswandari, S.E

Kabupaten Bantul

Pokja Pendataan dan Informasi

Ketua : Kabid Dalitbang Bappeda Tlau Sakti Santoso,

S.S.,M.Hum

Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Sugeng Arianto, M.Si

Kabupaten Bantul

2. Kasubbid Pengelolaan Data BKK Sugiyono

Kabupaten Bantul

Pokja Pengembangan Kemitraan

Ketua : Kabid Sarpras Bappeda Wagiyo, ST., MT
Anggota : Unsur AKAKOM Agus Sasmito, S.Kom

Pokja Pengaduan Masyarakat

Ketua : Kabid Pengendalian Program Bappeda Tlau Sakti Santoso,
Kabupaten Bantul S.S.,M.Hum
Anggota : Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Agus Sutomo, SH
Hukum Setda

Pokgram Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Kabid Data dan Pengkajian AM. Sofyan, S.KM, MMR
BKKPPKB
Anggota : Kasubbag Program Dinas Sosial Suryono, S.Sos, M.A
Kabupaten Bantul

Pokgram Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Kasubbid Pemberdayaan Novi Astuti, ST., MT
Masyarakat Bappeda
Anggota : 1. Kasi Usaha Ekonomi Desa Dan Lies Ratriana Nugrohowati,
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna S.IP.M.Si
PMD Kabupaten Bantul

2. Kasi UEDP TTG PMD Kabupaten Bantul Zan Ryanto, S. Sos

Pokgram Berbasis Pemberdayaan UEMK

Ketua : Kabid Perekonomian Bappeda Wagiyo, ST., MT

Anggota : 1. Kabid Koperasi Disperindakop Besari Setyowati, SE, MAP
Kabupaten Bantul

Pokgram Penguatan Pendidikan dan Kesehatan

Ketua : Kabid PK2 Bappeda Mujahid Amrudin, S.IP

Anggota : 1. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Sinta Asih Cahyani, Amd. Kep
Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul

Berikut penjelasan terkait tugas dari kelompok kerja dan kelompok program yang tergabung dalam TKPK Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Kelompok kerja pendataan dan informasi, kelompok ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan data kemiskinan. Selanjutnya juga mengembangkan sistem informasi kemiskinan. Yang terakhir menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini dan permasalahan kemiskinan.

2. Kelompok kerja pengembangan kemitraan, kelompok ini membuat suatu rumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta perumusan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
 3. Kelompok kerja pengaduan masyarakat, kelompok ini bertugas untuk merumuskan dan menyiapkan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 4. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok ini bertugas untuk memberdayakan keluarga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
 5. Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok ini bertugas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
 6. Kelompok program berbasis pemberdayaan UEMK, kelompok ini bertugas untuk meningkatkan daya saing UMKM masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasaran.
 7. Kelompok program penguatan pendidikan dan kesehatan, kelompok ini bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang sehat serta cerdas dengan menggerakkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- e. Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kecamatan

Personil TPK Kecamatan sekurang-kurangnya beserta penanggungjawab dan sekretariat berjumlah 7 orang. Kepengurusan TPK Kecamatan dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Camat dengan masa bakti tiga tahun. TPK Kecamatan bertugas melakukan fasilitas dan

koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat kecamatan. Nantinya TPK Kecamatan juga dibantu oleh LSM, lembaga pendidikan, dunia usaha dan Puskesmas. Berikut merupakan struktur organisasi TPK Kecamatan di Kabupaten Bantul :

Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Kedinasan
Penanggung Jawab	Camat
Ketua	Sekretaris Kecamatan
Sekretaris	Kasi Kesra dan Info
Anggota	Kasi Pemerintahan
	Kasi Trantib
	Staf PMD
	Staf Kesra dan Info

f. Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa

Personil TPK Kecamatan sekurang-kurangnya beserta penanggungjawab dan sekretariat berjumlah 6 orang. Kepengurusan TPK Desa dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dengan masa bakti tiga tahun. Tugas dari TPK Desa sendiri. Tugas TPK Desa bertugas melakukan fasilitas dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat desa. TPK desa sendiri dibantu oleh beberapa unsur seperti LSM, lembaga pendidikan, Badan Permusyawaratan Desa dan Dukuh.

Berikut merupakan struktur organisasi TPK Desa :

Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Kedinasan
Penanggung Jawab	Kepala Desa
Ketua	Sekretaris Desa
Sekretariat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Kepala Urusan Perencanaan Kepala Bagian Pembangunan

g. Tim Penanggulangan Kemiskinan Pedukuhan

Personil TPK Pedukuhan sekurang-kurangnya beserta penanggungjawab dan sekretariat berjumlah 5 orang. Kepengurusan TPK Pedukuhan dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa berdasarkan usulan dari Dukuh melalui musyawarah Pedukuhan dengan masa bakti tiga tahun. Tugas TPK Pedukuhan bertugas melakukan pendataan, pendampingan dan pemantauan perkembangan warga miskin di tingkat pedukuhan. TPK Pedukuhan sendiri dibantu oleh beberapa unsur seperti LSM, lembaga pendidikan, kader Keluarga Berencana dan tokoh masyarakat setempat.

Berikut merupakan struktur organisasi dari TPK Pedukuhan :

Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Kedinasan
Penanggung Jawab	Kepala Dukuh

Ketua

LPMD

Sekretariat

Sekretaris LPMD

Anggota

Ketua RT

Ketua PKK